



EVALUASI IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMPN 107 JAKARTA

Kasiati, Hery Muljono, Erna Kusumawati*

Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

Correspondence: *E-mail: kasiati16@gmail.com

ABSTRACTS

This study aimed to evaluate the implementation of the zoning PPDB in improving the quality of education at SMPN 107 Jakarta. Data were collected using observation, interview and documentation techniques with the Countenance Stake model. Qualitative descriptive analysis technique through QSR NVivo 12 software. The results of the study were: (1) The antecedent component showed a match between the availability of PPDB policy tools at SMP Negeri 107 and the policy in the DKI Jakarta Government. The availability of facilities both online and offline had been fulfilled. It was necessary to improve the stability of internet by reviewing the providers used. Criteria based on capacity with age selection. The change in the determination of the capacity from 36 changes to 40 students per study group. Zoning was determined by using district and subdistrict; (2) The transaction component showed that the PPDB mechanism and process at SMPN 107 was in standard with Kepdis No. 501/2020. PPDB was carried out online through the ppdb.jakarta.go.id site. There was server problems and unstable internet networks; (3) the outcome component of the decline in the quality of student learning achievement. Heterogeneous characteristics of students made competition between students less optimal, resulting in decreased learning enthusiasm.

Keywords: Evaluating of implementation, Quality of Education, Zoning PPDB

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 02 Aug 2020

First Revised 31 Aug 2020

Accepted 30 Oct 2020

First Available online 05 Nov 2020

Publication Date 01 Apr 2021

1. PENDAHULUAN

Program “Merdeka Belajar” merupakan wujud adanya demokratisasi pendidikan yang membawa perubahan dalam pendidikan. Nadim Makarim menyatakan bahwa program “merdeka belajar” meliputi: 1) AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yang akan menggantikan UN (Ujian Nasional), 2) USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) akan dikembalikan ke sekolah, 3) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) lebih disederhanakan, 4) PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi lebih diperluas (Dikta, 2020). Pemenuhan tuntutan peningkatan dalam aspek ketrampilan dan pengetahuan diarahkan pada kebijakan yang mengacu pada kebijakan program “Merdeka Belajar” tersebut.

Kualitas pendidikan masih bertumpuk pada suatu wilayah tertentu, terutama di kota-kota yang menjadi pusat perekonomian. Akses pendidikan yang sama belum bisa dinikmati seluruh peserta didik, sehingga menciptakan sekolah favorit dan sekolah yang bukan favorit. Sekolah favorit yang menampung komunitas siswa yang pintar terkesan lebih superior dan homogen. Sedangkan, sekolah non favorit cenderung menjadi inferior dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kesenjangan antar sekolah semakin kuat karena ketimpangan kualitas guru antara sekolah favorit dan tidak favorit yang tidak bisa dihindari (Risna et al., 2020).

Sekolah favorit cenderung lebih banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat terutama dari orang tua peserta didik yang anaknya bersekolah di sekolah favorit. Donasi individu atau kolektif mengakibatkan popularitas sekolah favorit semakin melejit dan akselerasi ketersediaan sarana dan prasarana bukan hanya bersifat kuantitatif tetapi juga semakin berkualitas. Kenyataan tersebut semakin memperkuat paradigma masyarakat untuk berlomba memasukkan anaknya ke sekolah yang berlabel favorit (Arif, 2019).

PPDB berbasis zonasi adalah regulasi yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada semua wilayah. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB sebagai salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peraturan ini diperbaharui menjadi Permendiknas nomor 20 Tahun 2019, untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPDB di semua daerah diadakan perubahan lagi dengan Permendiknas Nomor 44 Tahun 2019.

Terbitnya Permendiknas Nomor 44 Tahun 2019 menampung keinginan orang tua untuk memilih sekolah yang terbaik dengan tetap menghargai prestasi anaknya. Kebijakan tersebut adalah wujud kompromi antara kebutuhan pendidikan yang adil bagi semua jenjang pendidikan, sehingga bisa mendapatkan sekolah yang baik serta wujud kompromi dari usaha orang tua dalam mencapai prestasi anaknya melalui kejuaraan pada perlombaan di tingkat sekolah, wilayah, provinsi ataupun nasional, dimana mereka bisa memperoleh pilihan sekolah yang diinginkan (Perdana, 2019).

PPDB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa siswa yang status ekonomi dibawah rata-rata kenyataannya mendapatkan sekolah yang kualitasnya rendah sebab sekolah-sekolah swasta yang berkualitas harganya mahal. Ditambah lagi, peserta didik dari kalangan tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri yang disubsidi pemerintah. Siswa tidak mampu justru tersingkir di jalur zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan siswa yang mampu. Menurut Mashudi (2019) perbedaan PPDB berbasis zonasi pada tahun 2019 dengan PPDB tahun 2020 adalah pada

kuota yang disediakan, PPDB tahun 2019 dengan sebanyak 80 % sedangkan pada PPDB tahun 2020 sebanyak 50 % dari keseluruhan daya tampung. PPDB tahun 2020 terdapat perubahan juga pada sistem seleksi yang sebelumnya menggunakan nilai UN (Ujian Nasional) berganti dengan seleksi dengan menggunakan umur.

Sistem PPDB ini mendapatkan protes dari orangtua peserta didik, mereka berpandangan bahwa mekanisme PPDB pada jalur zonasi tersebut lebih mengutamakan calon peserta didik baru (CPDB) yang berumur lebih tua. Banyak CPDB berumur lebih muda tersingkir oleh calon peserta didik yang berumur lebih tua. CPDB yang bertempat tinggal masih dalam satu kelurahan bahkan berdekatan dengan gedung sekolah pilihannya tidak diterima jalur zonasi (Nurlailiyah, 2019).

Pemprov DKI Jakarta telah membuat perubahan regulasi melalui Keputusan Kepdis Pendidikan Nomor 670 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepdis Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk PPDB tahun pelajaran 2020/2021. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengadakan pembukaan PPDB jalur zonasi bina RW sekolah. Keputusan ini menampung tingginya keinginan masyarakat untuk masuk ke sekolah yang berstatus negeri, di mana ada siswa berada pada satu RW dengan sekolahnya belum dapat ditampung di sekolah tersebut. CPDB yang bertempat tinggal di satu RW dengan RW sekolah yang dituju dapat mengikuti PPDB pada jalur zonasi bina RW sekolah.

Kuota PPDB jalur bina RW sebanyak empat siswa per rombongan belajar. Pendaftaran untuk memilih sekolah dilakukan secara online, CPDB hanya diberi satu kali kesempatan untuk mendaftar. Tahapan jalur zonasi Bina RW diuraikan sebagai berikut: 1) Domisili CPDB terdata di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan; 2) Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi, dengan mengurutkan usia CPDB dari usia tertua ke usia termuda; 3) Jika terdapat usia yang sama, maka dilakukan seleksi, dengan mengurutkan waktu mendaftar yang lebih awal; 4) CPDB yang diterima sementara selama proses seleksi, tidak dapat mengganti pilihan sekolah; 5) Jika CPDB tidak diterima di sekolah pilihan, maka dapat mendaftar di sekolah lain dalam RW yang sama selama jadwal pendaftaran masih berlangsung.

Berdasarkan data statistik pada PPDB online DKI Jakarta tahun 2020 peminat CPDB di SMPN 107 Jakarta dari semua jalur sebesar 2.070 siswa. Jalur zonasi peminatnya sebagai berikut pilihan pertama berjumlah 426 siswa, pilihan kedua berjumlah 290 siswa, pilihan ketiga berjumlah 147 siswa. Daya tampung SMPN 107 Jakarta pada tahun pelajaran 2020/2021 sebesar 252 siswa. Perkembangan prestasi yang semakin meningkat, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih SMPN 107 sebagai sekolah yang paling tepat bagi anaknya. Namun, daya tampung yang terbatas, sehingga tidak bisa menampung seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar. Kondisi tersebut, merupakan awal dari permasalahan dan kendala dalam PPDB di SMPN 107 Jakarta. Kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi mengadakan protes sebagai wujud tidak dilindunginya hak asasi dalam kebebasan memilih pendidikan sesuai yang di inginkan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dan pentingnya upaya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi bisa terwujud dengan baik, maka dilakukanlah penelitian ini. Fokus Penelitian ini adalah evaluasi implementasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 107 Jakarta.

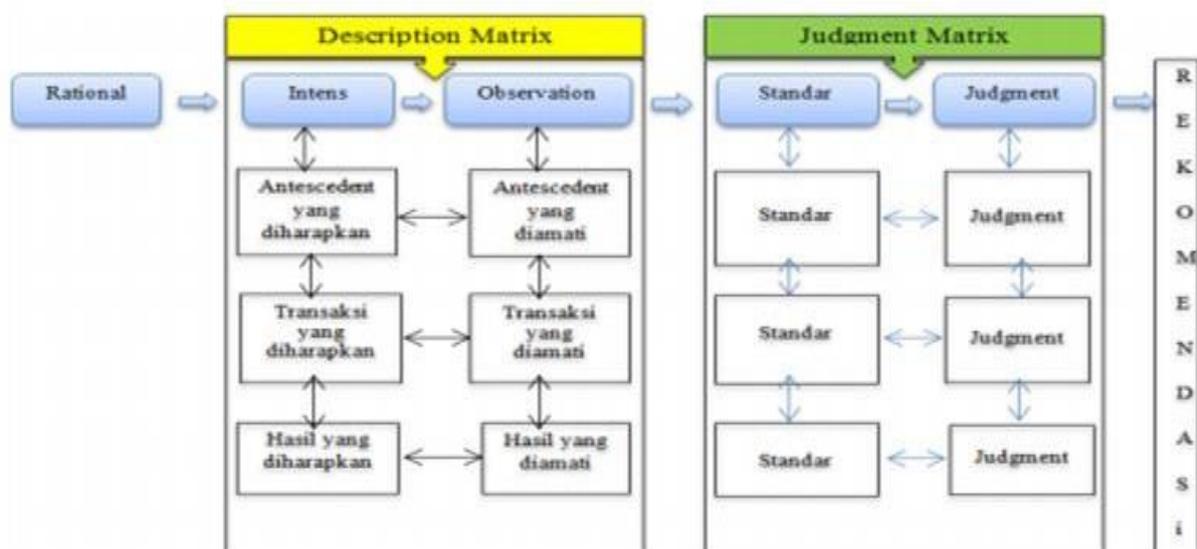
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMPN 107 Jakarta menggunakan deskriptif evaluatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari PPDB berbasis zonasi. Hasil informasi yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Model evaluasi dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Countenance Stake*.

Pada model evaluasi *Countenance Stake* terdiri dari dua matriks yang perlu dianalisis yaitu matriks deskripsi (*descriptions*) dan matriks pertimbangan (*judgement*). Matriks deskripsi terdiri dari intens program dan hasil observasi yang dilakukan evaluator terhadap program. Matriks pertimbangan terdiri dari standar atau tolak ukur kebijakan dalam hal ini Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 dan pertimbangan evaluator.

Evaluasi dilakukan dengan menjabarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan disesuaikan dengan langkah-langkah desain *countenance stake*. Ruang lingkup masalah evaluasi komponen *antecedent* meliputi ketersediaan perangkat kebijakan PPDB dan ketersediaan fasilitas PPDB berbasis zonasi.

Komponen *transaction* meliputi mekanisme PPDB dan proses PPDB berbasis zonasi tahun 2020. Komponen *Outcome* meliputi dampak PPDB berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan untuk ketiga komponen evaluasi yaitu *antecedent*, transaksi, dan *outcome*. Desain penelitian model evaluasi *countenance* yang dikembangkan *Stake* ditampilkan seperti pada **Gambar 1** berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian dengan model *Countenance Stake*

Dari **Gambar 1**, Subjek penelitian meliputi sumber data primer maupun data sekunder. Sumber data primer dengan memilih informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara detail. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah a) Dokumen peraturan PPDB; b) Profil Sekolah; c) Visi dan Misi; d) Data prestasi siswa; e) Foto-foto

kegiatan PPDB. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan dokumen pribadi.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai objek penelitian, maka peneliti menggunakan observasi partisipan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian pada kegiatan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 107 mulai dari persiapan, proses sampai penutupan.

Peneliti menggunakan berbagai media, karena kondisi adanya pandemi covid 19 harus menerapkan protokol kesehatan, serta adanya aturan *Work from Home* (WFH). Informan kunci yaitu kasubdin, kepala sekolah dan panitia PPDB dengan menggunakan tatap muka bertemu secara langsung. Sedangkan, guru, orang tua murid dan murid dengan menggunakan media *zoom meeting* dan telepon. Sedangkan alat bantu yang peneliti gunakan dalam metode dokumentasi adalah perekam gambar, atau foto.

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan *software* QSR NVivo 12. Semua sumber data yang diperoleh diimpor ke dalam *software* QSR NVivo 12 untuk keperluan analisis data. Dalam NVivo 12, sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi kerangka matriks (*Framework matrices*), sumber data penelitian internal (*Internals*), sumber data penelitian eksternal (*Externals*), dan catatan-catatan peneliti selama mengumpulkan data (*Memos*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, kemudian dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Agar lebih terperinci, maka dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang dievaluasi.

1) Hasil Evaluasi Komponen *Antecedent*

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hudjolly, 2017).

Pada studi dokumentasi dan hasil temuan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui dinas pendidikan sudah menetapkan kebijakan PPDB berbasis zonasi yang dituangkan dalam Juknis melalui Keputusan Kepala Dinas No. 501 Tahun 2020. Juknis ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2019 Tentang PPDB. Ketersediaan perangkat PPDB sudah terpenuhi, namun terdapat perubahan kebijakan di tengah-tengah proses pelaksanaan PPDB dengan menambah jalur bina RW.

Komponen yang di evaluasi pada *antecedent* adalah ketersediaan perangkat kebijakan terkait PPDB dan ketersediaan fasilitas pada PPDB berbasis zonasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 107 Jakarta sebagaimana tertera pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Countenance Matrix Komponen Antecedent

<i>Description Matrix</i>		<i>Judgment Matrix</i>	
<i>Intens</i>	<i>Observation</i>	<i>Standards</i>	<i>Judgments</i>
Ketersediaan perangkat kebijakan terkait PPDB.	Adanya ketersediaan perangkat kebijakan PPDB di SMP Negeri 107 Jakarta	Perangkat PPDB meliputi: Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2019 Tentang PPDB Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 670 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 501 Tahun 2020 Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 506 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 511 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Posko Layanan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021	Adanya kesesuaian antara ketersediaan perangkat kebijakan PPDB di SMP Negeri 107 dengan kebijakan di Pemprov DKI Jakarta
Ketersediaan fasilitas sesuai Kepdis No. 511 Tahun 2020	Adanya ketersediaan fasilitas PPDB di masa covid baik secara daring maupun luring, namun ada hal yang perlu diperbaiki yaitu penyediaan jaringan internet stabil.	Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 511 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Posko Layanan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 pada lampiran meliputi : Layanan posko secara Daring Layanan posko secara Luring	Ketersediaan fasilitas baik secara daring maupun luring sudah terpenuhi. Perlu adanya perbaikan dalam penyediaan jaringan internet. Perlu adanya pengkajian ulang provider yang akan di ajak kerjasama dalam penyediaan jaringan internet yang stabil

Tabel 1 menampilkan bahwa adanya kesesuaian antara ketersediaan perangkat kebijakan PPDB di SMP Negeri 107 dengan perangkat kebijakan di Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

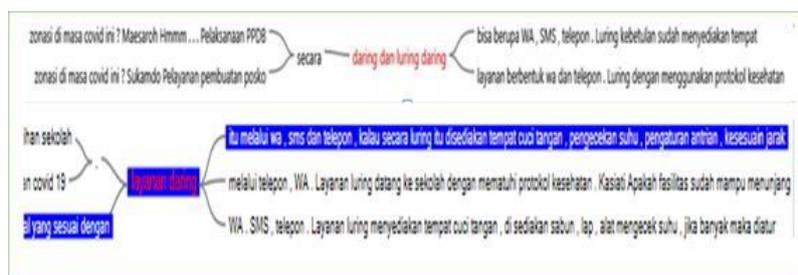
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Permatasari, 2020).

Ketersediaan fasilitas PPDB di SMP Negeri 107 Jakarta belum adanya kesesuaian dengan standar peraturan PPDB, terutama dalam ketersediaan fasilitas jaringan internet. Hasil pencarian dengan fitur *Word Frequency Query Software* QSR NVivo 12 ditemukan kata-kata yang dominan yaitu 'daring', 'luring' dan 'cuci tangan' yaitu 2% serta 'telepon', 'tempat', 'akademik', 'fasilitas', 'kesehatan' masing-masing 1%. *Word cloud* dari 20 kata dominan yang digunakan dalam sumber data penelitian divisualisasikan sebagai **Gambar 2** berikut.



Gambar 2. *Word Cloud* dari 20 Kata Terdominasi Pada Ketersediaan Fasilitas Kebijakan PPDB

Dari **Gambar 2** di atas, terlihat hasil pencarian *Text Search Query* terhadap kata-kata 'luring' dan 'daring' yang merupakan kata terdominan dari berbagai sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Hasil pencarian tersebut ditampilkan dalam *Word Tree* sebagai **Gambar 3** berikut ini.



Gambar 3. *Word Tree* dari Penggunaan Kata 'Luring' dan 'Daring'

Gambar 3 dan hasil wawancara guru (Gr1A3a) memberikan informasi bahwa ketersediaan fasilitas pada PPDB dimasa covid ini meliputi fasilitas untuk pelayanan secara daring dan luring. Fasilitas secara daring berupa web PPDB, internet, *whats app*, telepon, dan sms. Dipertegas oleh kepek (KepA3a) dan guru (Gr2A3a) bahwa layanan secara luring bagi masyarakat yang datang ke sekolah secara langsung, fasilitas yang disediakan berupa fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan seperti alat mencuci tangan, nomor antrian, kursi yang letaknya berjarak satu meter. Selain itu, Laptop, alat pengecek suhu dan pemakaian masker. Hasil wawancara Kepala sekolah (KepA3b) menjelaskan bahwa karena pelayan masyarakat fasilitas yang disediakan dengan maksimal, hasil *crosscheck* dengan guru (Gr5A3b) menyebutkan bahwa fasilitas sudah mendukung pelaksanaan PPDB, dibuktikan selama PPDB berjalan lancar hingga tahap akhir.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah (KepA3c) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan PPDB berkaitan dengan jaringan internet dan server, di *crosscheck* dengan panitia PPDB (Pn1A3c) menyatakan bahwa internet tidak stabil. Selain itu, beberapa orang tua yang belum paham dengan sistem datang ke sekolah dengan tidak mengikuti protokol kesehatan. Hasil catatan lapangan pada awal pembukaan PPDB sempat koneksi

terhenti, disebabkan masyarakat secara bersamaan mengakses web PPDB server tidak kuat menampungnya. Peristiwa ini terjadi di hari pertama dan dilaporkan ke dinas untuk ditindak lanjuti. Selain *server* terdapat kendala juga pada jaringan internet.

2) Hasil Evaluasi Komponen *Transaction*

Komponen yang dievaluasi pada *transaction* meliputi mekanisme PPDB, proses PPDB dan hambatan pada mekanisme dan proses PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 tahun 2020. Berikut ini disajikan *countenance matrix* mekanisme dan proses PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 yang ditampilkan pada **Tabel 2** sebagai berikut.

Tabel 2. Countenance Matrix Komponen *Transaction*

<i>Description Matrix</i>		<i>Judgment Matrix</i>	
<i>Intens</i>	<i>Observation</i>	<i>Standards</i>	<i>Intens</i>
Mekanisme PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 107.	Adanya pelaksanaan mekanisme PPDB sesuai tahap-tahap pendaftaran.	Berdasarkan Juknis Kepdis No 501 Tahun 2020 pada lampiran II mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan PPDB, meliputi: 1. Pra pendaftaran 2. Pengajuan cetak PIN/Token 3. Aktivasi PIN/Token 4. Pendaftaran 5. Laport Diri Daring	Terdapat kesesuaian antara tahap pendaftaran PPDB di SMP Negeri 107 Berbasis Zonasi dengan Kepdis No. 501 Tahun 2020.
Proses PPDB Berdasar Kepdis No. 501 Tahun 2020	Adanya proses PPDB sesuai ketentuan dan persyaratan pada Keputusan Kepdis No. 501 Tahun 2020	Berdasarkan Keputusan Kepdis No.501 Tahun 2020 pada lampiran yang mengatur tentang: 1. Ketentuan 2. Persyaratan 3. Pendaftaran 4. Pelaksanaan 5. Pengumuman dan laport diri	Terdapat kesesuaian proses PPDB di SMP Negeri 107 Berbasis zonasi dengan Kepdis No. 501 Tahun 2020.
Hambatan pada mekanisme dan proses PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107	Adanya hambatan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu jaringan internet dan <i>server</i> .	Berjalan sesuai mekanisme PPDB dengan lancar tanpa hambatan	Terdapat hambatan dalam pelaksanaan PPDB yaitu jaringan internet yang tidak stabil dan kekuatan <i>server</i> yang tidak mendukung sejumlah pendaftar. Perlu peningkatan pada penyediaan jaringan dan <i>server</i> .

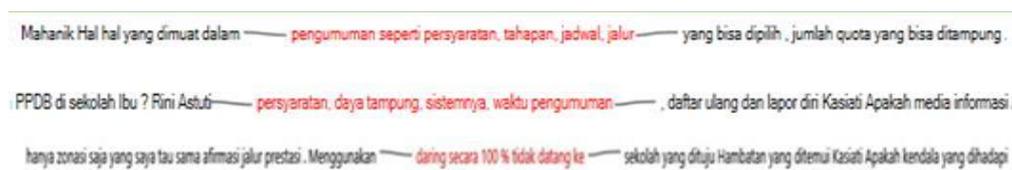
Tabel 2 menunjukkan adanya kesesuaian mekanisme PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta dengan Kepdis No. 501 Tahun 2020. Mekanisme PPDB di SMP Negeri 107 meliputi 1) Pra pendaftaran, 2) Pengajuan Cetak PIN/Token, 3) Aktivasi PIN atau Token, 4)

Pendaftaran, 5) Lapor Diri. Hasil pencarian dengan fitur *Word Frequency Query Software* QSR NVivo 12 dari berbagai sumber data yang telah di impor. Kata-kata ‘zonasi’ merupakan kata dengan frekwensi paling banyak muncul yaitu 2% di susul kata ‘daring’, ‘online’, ‘seleksi’, ‘persyaratan’ dan ‘pengumuman’ yaitu 1%. *Word cloud* dari 20 kata dominan yang digunakan dalam sumber data penelitian digambarkan sebagai **Gambar 4** berikut ini.



Gambar 4. *Word Cloud* dari 20 Kata Terdominasi Pada Mekanisme PPDB Berbasis Zonasi

Dari **Gambar 4** di atas, peneliti ingin memahami penggunaan kata ‘Zonasi’ yang merupakan kata terdominan dari berbagai sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Selanjutnya mengembangkan lagi dengan kata-kata ‘daring’ dan ‘persyaratan’ Hasil pencarian tersebut ditampilkan dalam *Word Tree* sebagai **Gambar 5** berikut.



Gambar 5. *Word Tree* dari Penggunaan Kata ‘Pengumuman’, ‘Daring’ dan ‘Persyaratan’

Dari **Gambar 5** dan hasil wawancara kepala sekolah (KepT1a) menunjukkan bahwa mekanisme PPDB berbasis zonasi menunjukkan kesesuaian dengan Kepdis No. 501 Tahun 2020. Hasil *crosscheck* Ketua panitia PPDB (Pn1T1a) bahwa informasi meliputi persyaratan, pendaftaran, daya tampung, waktu pengumuman, jalur-jalur dalam PPDB dan sistem seleksi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari Juknis Kepdis No.501 Tahun 2020 menyebutkan pra pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan memasukkan data calon peserta didik baru ke dalam database sistem PPDB daring. Hasil wawancara dengan Ketua panitia PPDB (Pn1A2a) menjelaskan bahwa PPDB di SMP 107 secara online dengan melakukan pra pendaftaran untuk siswa luar DKI, sedangkan pendaftaran dalam DKI dilakukan dengan pengajuan akun dengan mengisi formulir serta mempersiapkan dokumen yang akan di-*upload*.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas No. 501 Tahun 2020 Lampiran X bahwa proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 107 sudah sesuai dengan juknis meliputi: 1) Ketentuan, 2) Persyaratan, 3) Pendaftaran, 4) Pelaksanaan. Ketentuan berdasarkan juknis bahwa CPDB adalah warga DKI maupun Luar DKI dan memenuhi persyaratan usia. Jenjang SMP persyaratan usia paling tinggi 15 tahun, memiliki akte kelahiran, memiliki NIK, memiliki buku raport kelas 5 dan 6, khusus jalur bina RW adalah lulusan tahun 2020 dan belum diterima pada jalur sebelumnya. CPDB mendaftar secara daring sesuai akun yang didapat, selanjutnya

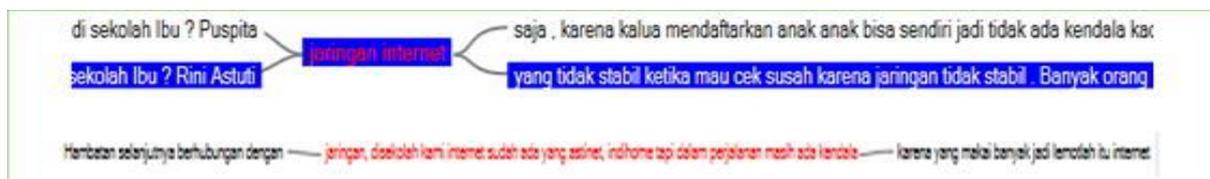
CPDB mendaftar sesuai kuota yang telah ditentukan. Pendaftar di SMP Negeri 107 melebihi daya tampung sehingga CPDB diseleksi dengan urutan usia, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Sedangkan, untuk bina RW wilayah SMP 107 termasuk RW 6.

Hambatan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi ini di SMP Negeri 107 Jakarta digambarkan pada hasil pencarian, dengan fitur *Word Frequency Query Software QSR NVivo 12* ditemukan kata-kata yang dominan yaitu ‘jaringan’ dan ‘internet. Sebesar 2 %. *Word cloud* dari 20 kata dominan yang digunakan dalam sumber data penelitian ditampilkan sebagai **Gambar 6** berikut ini.



Gambar 6. *Word Cloud* Dari 20 Kata Terdominasi Pada Hambatan pelaksanaan PPDB berbasis Zonasi

Dari **Gambar 6**, peneliti ingin memahami penggunaan kata ‘jaringan’ yang merupakan kata terdominan dari berbagai sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Selanjutnya mengembangkan lagi dengan kata-kata ‘internet’. Hasil pencarian tersebut ditampilkan dalam *Word Tree* sebagai **Gambar 7** berikut ini.



Gambar 7. *Word Tree* dari Penggunaan Kata ‘Jaringan’ dan ‘internet’ dalam Sumber Data Penelitian

Dari **Gambar 7** dan hasil catatan lapangan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2020 salah satu pendaftar menyampaikan kesulitan dalam mendaftarkan anaknya karena tidak menguasai teknologi dalam PPDB secara online. Hasil wawancara dengan kepala sekolah (KepTca) menunjukkan bahwa hambatan yang ditemui pada pelaksanaan PPDB adalah *server* dan jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini juga dipertegas oleh orang tua murid (Otm₁Tca) saat mendaftarkan anaknya terkendala dengan internet. Hasil wawancara dengan kepala sekola (KepT3b) menyebutkan bahwa jaringan internet yang tidak stabil dalam mengatasi kendala dengan mengecek kabel bila tidak terselesaikan akan menghubungi *provider*.

3) Hasil Evaluasi Komponen *Outcome*

Komponen yang dievaluasi pada *Outcome* meliputi dampak PPDB berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut ini disajikan *countenance matrix* dampak PPDB berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107 sebagai **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. *Countenance Matrix* Komponen *Outcome*

<i>Description Matrix</i>		<i>Judgment Matrix</i>	
<i>Intens</i>	<i>Observation</i>	<i>Standards</i>	<i>Judgments</i>
Dampak PPDB berbasis zonasi pada Kualitas Pendidikan	Adanya penurunan output sekolah berupa nilai hasil belajar baik akademik maupun non akademik	Berdasarkan teori kualitas pendidikan (Hoge, 2003), dan teori efektifitas kualitas sekolah (Kristiawan et al., 2017) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan dapat merujuk pada input, proses dan output	Dampak PPDB berbasis zonasi dengan seleksi umur adanya karakteristik peserta didik yang heterogen. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai hasil belajar baik akademik maupun non akademik.
Upaya mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi.	Adanya upaya mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi.	Adanya upaya mengatasi dampak PPDB dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107.	Guru perlu meningkatkan profesionalismenya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.

Tabel 3 menunjukkan adanya penurunan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB yakni untuk mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan calon peserta didik dengan domisili tempat tinggal nya, mengurangi kemacetan, serta menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit juga dengan utama adalah pemerataan pada kualitas pendidikan (Sabrina, 2019). Pada penelitian yang berjudul program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia menjelaskan bahwa program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia (Safarah dan Wibowo, 2018).

Hasil wawancara kasudin (KasA4a) bahwa tujuan ditetapkan PPDB berbasis zonasi ini adalah agar pendidikan bisa diakses masyarakat secara merata. Sistem ini memberikan pemerataan seluruh golongan dengan mendapat kesempatan yang sama. Masyarakat terbagi menjadi empat kuadran yaitu kuadran satu adalah orang tua kaya raya tapi anaknya kurang pintar, kuadran dua adalah orang tua mampu anaknya pindai, kuadran tiga adalah anaknya pandai tapi orang tua tidak mampu, kuadran empat adalah anak kurang pandai orang tua tidak mampu. PPDB zonasi dengan seleksi usia ini akan menampung dari semua kuadran tersebut, Sejalan dengan kepala sekolah (KepA4a) menyampaikan PPDB berbasis zonasi bisa menjadi eskalator, orang berusaha atau tidak berusaha akan ikut naik ke tangga. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera agar ikut dalam eskalasi dengan diberikan pintu masuk melalui PPDB berbasis zonasi dengan menggunakan seleksi usia.

Hasil pencarian dengan fitur *Word Frequency Query Software QSR NVivo 12* dari berbagai sumber data yang telah di impor. Kata-kata 'sekolah' sebesar 2 % disusul kata-kata 'zonasi', 'karakteristik', 'akademik' dan 'favorit' merupakan kata dengan frekwensi paling banyak muncul yaitu 1 %. *Word cloud* dari 20 kata dominan yang digunakan dalam sumber data penelitian ditampilkan sebagai **Gambar 8** berikut.



Gambar 8. Word Cloud dari 20 Kata Terdominasi Dampak PPDB Berbasis Zonasi

Dari Gambar 8, peneliti ingin memahami penggunaan kata ‘sekolah’ yang merupakan kata terdominan dari berbagai sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Selanjutnya mengembangkan lagi dengan kata-kata ‘karakteristik’ dan ‘non akademik’. Hasil pencarian tersebut disajikan dalam Word Tree sebagai gambar 9 berikut.



Gambar 9. Word Tree dari Penggunaan Kata ‘Favorit’ dalam Sumber Data Penelitian

Informasi yang bisa diambil dari Gambar 9 dan hasil wawancara dengan guru (Gr₁O1a), (Gr₂O1a) serta (Gr₅O1a) bahwa PPDB berbasis zonasi membawa perubahan pada karakteristik peserta didik yang lebih heterogen baik dalam faktor akademik dan non akademik. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan siswa (Pd₁O1a) terdapat beberapa temannya yang lebih di atas rata-rata usianya. Hasil temuan PPDB berbasis zonasi dengan seleksi usia membawa perubahan pada siswa yang heterogen tingkat usia, status ekonomi serta latar belakang pendidikan orang tua. Berdasarkan catatan lapangan, rapat evaluasi BDR yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru lengkap memberikan informasi, bahwa permasalahan peserta didik kelas 7, 8 dan 9 yang paling mendominasi adalah permasalahan pada kelas 7. Permasalahan tersebut meliputi, latar belakang orang tua, kurang tanggungjawab, adanya semangat belajar dan faktor ekonomi.

Upaya mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi ini di SMP Negeri 107 Jakarta tampak pada, hasil pencarian dengan fitur Word Frequency Query Software QSR NVivo 12 ditemukan kata-kata yang dominan yaitu ‘belajar’ sebesar 2 %, lalu disusul kata-kata ‘heterogen’, ‘sekolah’, ‘pelatihan’, ‘mengajar’ dan ‘karakteristi’ yaitu 1 %. Word cloud dari 20 kata dominan yang digunakan dalam sumber data penelitian ditampilkan sebagai Gambar 10 berikut.



Gambar 10. Word Cloud dari 20 Kata Terdominasi pada Upaya Mengatasi PPDB Berbasis Zonasi

Dari **Gambar 10**, peneliti ingin memahami penggunaan kata ‘belajar’ yang merupakan kata terdominan dari berbagai sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Selanjutnya mengembangkan lagi dengan kata-kata ‘pelatihan’, serta ‘mengajar’. Hasil pencarian tersebut ditampilkan dalam *Word Tree* sebagai **Gambar 11** berikut.



Gambar 11. *Word Tree* dari Penggunaan Kata ‘Pelatihan’, ‘Karakteristik’ dan ‘Belajar’

Informasi yang didapatkan dari **Gambar 11** dan hasil wawancara dengan guru (Gr₃O2a) dan (Gr₁O2a) untuk mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi pada kondisi siswa yang heterogen adalah adanya perubahan kinerja guru yang harus lebih kreatif dalam memilih metode dan materi pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong kreatifitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21. Empat kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut *Critical Thinking* atau berpikir kritis, *Collaboration* atau kemampuan bekerja sama dengan baik, *Communication* atau kemampuan berkomunikasi dan *Creativity* atau kreatifitas (dikutip dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/pentingnya-4c-untuk-menghadapi-abad-21> yang diakses pada 15 Juni 2020).

Hasil wawancara dengan kepala sekolah (KepO2a) bahwa guru perlu meningkatkan pembelajaran secara kreatif dan inovatif, guru harus membuat perencanaan dengan matang disesuaikan kondisi PJJ dan disetorkan setiap hari sebagai bahan evaluasi dan monitoring, guru mengikuti pelatihan-pelatihan serta bekerja sama dengan orang tua, siswa dan komite agar segala kendala bisa di atasi dengan segera mungkin. Evaluasi implementasi PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 menunjukkan bahwa, dengan seleksi umur berdampak pada penurunan kualitas prestasi belajar peserta didik. Karakteristik peserta didik yang heterogen membuat persaingan antar peserta didik kurang maksimal, berakibat menurunnya semangat belajar.

4. KESIMPULAN

Adanya kesesuaian antara ketersediaan perangkat kebijakan PPDB di SMP Negeri 107 dengan ketentuan kebijakan di Pemprov DKI Jakarta. Ketersediaan fasilitas baik secara daring maupun luring sudah terpenuhi, namun perlu adanya perbaikan dalam penyediaan jaringan internet melalui pengecekan jaringan serta pengkajian ulang terhadap *provider* yang akan di ajak kerjasama dalam penyediaan jaringan internet. Adanya kesesuaian antara mekanisme dan proses PPDB di SMP Negeri 107 berbasis zonasi dengan Kepdis No. 501 Tahun 2020. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan PPDB yaitu jaringan internet yang tidak stabil dan kekuatan *server* yang tidak mendukung sejumlah pendaftar.

Dampak PPDB berbasis zonasi dengan seleksi umur adalah adanya karakteristik peserta didik yang heterogen sehingga mempengaruhi daya saing dalam belajar. Hal ini

mengakibatkan penurunan output sekolah berupa nilai hasil belajar baik akademik maupun non akademik. Kebijakan PPDB berbasis zonasi ini perlu adanya pengkajian ulang terhadap seleksi berdasarkan umur, serta memperbanyak kuota jalur prestasi akademik. Untuk mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta perlu adanya peningkatan profesionalisme guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan peningkatan pemanfaatan teknologi yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. M. (2019). Nalar masalahat dalam kebijakan zonasi dan penguatan pendidikan karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 2(1), 39-66.
- Dikta, P. G. A. (2020). Pembelajaran berorientasi Tri Hita Karana sebagai upaya penguatan kualitas pendidikan dasar pada abad ke-21. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 126-136.
- Hudjolly, H. (2017). Epistemologi dalam kebijakan publik: Kajian konsep smart city di Indonesia. *Untirta Civic Education Journal*, 2(1), 31-48.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA/SMK dalam mendorong pemerataan kualitas sumberdaya manusia di Jawa Timur. Nidhomul Haq: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186-206.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13-21.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 1-18.
- Sabrina, D. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92-103.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206-213.